

Katalog BPS : 2205.35

798

Laporan Eksekutif

**STATISTIK
POLITIK DAN KEAMANAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

HASIL PODES 2005



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROPINSI JAWA TIMUR**

KATA PENGANTAR

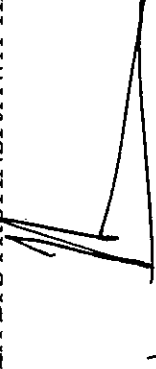
Laporan Eksekutif Statistik Politik dan Keamanan Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 ini, merupakan laporan ringkas hasil Potensi Desa (Podes) 2005 yang memuat data tentang kondisi politik dan keamanan di tingkat desa di propinsi Jawa Timur, seperti dominasi partai pemenang pemilu, konflik yang terjadi, serta tindak kejahatan yang dominan.

Laporan Eksekutif ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna data dengan cepat dan mudah. Seperti diketahui para pengguna data, khususnya pengambil kebijakan baik di pemerintahan maupun legislatif tidak mempunyai waktu banyak untuk mengkaji data secara rinci.

Bagi pengguna data yang memerlukan data rinci, hasil Podes 2005 juga diterbitkan dalam bentuk publikasi yang berjudul "Statistik Potensi Desa Propinsi Jawa Timur 2005". Publikasi ini memuat secara lengkap karakteristik desa di Propinsi Jawa Timur yang dirinci menurut Kabupaten/Kota.

Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan berikutnya. Semoga laporan eksekutif ini bermanfaat.

Surabaya, Juni 2006
KEPALA BPS PROPINSI JAWA TIMUR,



DJAMAL, SE, M.Sc
NIP. 340004373

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Metodologi	2
2	
PETA POLITIK JAWA TIMUR	
2.1. Partai Pemenang Pemilu	3
2.2. Keberadaan Kepengurusan Partai	4
3	
KONFLIK DALAM MASYARAKAT	
3.1. Variasi Konflik	6
3.2. Efek Terjadinya Konflik	8
3.3. Penyelesaian Konflik	9
4	
KEJAHATAN DAN PENANGGULANGANNYA	
4.1. Jenis Kejahatan Yang Terjadi	10
4.2. Kecenderungan Tindak Kejahatan	11
4.3. Upaya Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan	12
4.4. Keberadaan Sarana dan Aparat Pengamanan	13
5	
PENUTUP	16

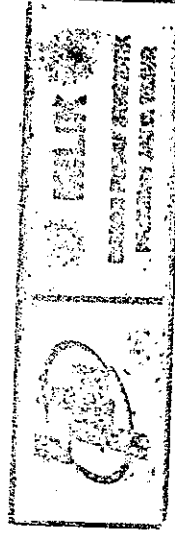
PENDAHULUAN

Dalam era reformasi dan otonomi daerah ini pembangunan di Indonesia lebih mengedepankan pembangunan yang diinginkan daerah. Pembangunan seperti ini dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan situasi dan kondisi politik dan keamanan yang kondusif di masing-masing daerah. Sebagai konsekuensinya data yang berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan hingga wilayah yang terkecil sangat diperlukan. Data tersebut sangat penting karena selain dapat memberikan gambaran kondisi keamanan suatu wilayah juga dapat menjadi jaminan bagi investor yang akan berinvestasi dan juga berguna untuk perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

1.1. Latar Belakang

Semenjak reformasi, peta dan sistem perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental. Perubahan tersebut memberikan efek domino pada semua bidang kehidupan Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Jawa Timur juga turut merasakan dampaknya. Walaupun tidak secara drastis, sistem perpolitikan tersebut juga memberikan dampak pada peta perpolitikan ke arah yang lebih baik di Jawa Timur.

Pada sisi yang lain, reformasi ternyata juga mengakibatkan adanya perubahan yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Perubahan tersebut memunculkan bentuk-bentuk kejahatan yang sebelumnya tidak terjadi, dimana kejahatan ini pada ujungnya berdampak pada situasi dan kondisi keamanan wilayah. Situasi dan kondisi keamanan yang kondusif akan sangat membantu kelancaran pembangunan dan aktivitas masyarakat.



Situasi dan kondisi keamanan suatu daerah dapat digambarkan oleh beberapa indikator, antara lain konflik horisontal yang terjadi dalam masyarakat, jenis tindak kejahatan yang terjadi, dan upaya masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Pergeseran parameter keamanan akan memberikan gambaran mengenai perubahan kondisi keamanan wilayah. Dari indikator yang dibangun secara sederhana tersebut dapat diketahui kondisi riil yang terjadi. Sebagai contoh, dominasi partai tertentu di suatu wilayah dalam pemilu dapat menggambarkan peta kekuatan politik di wilayah tersebut.

Mengingat pentingnya peran indikator-indikator tersebut untuk evaluasi keberhasilan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, maka pendataan situasi dan kondisi politik dan keamanan perlu dilakukan secara berkesinambungan.

1.2. Tujuan

Laporan eksekutif ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran kuantitatif kepada pengguna data mengenai situasi dan kondisi politik serta keamanan wilayah desa/kelurahan di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2005.

1.3. Ruang Lingkup

Dalam laporan eksekutif ini kondisi politik dan keamanan di Jawa Timur disajikan dalam bentuk *small area statistic* (wilayah desa/kelurahan) dengan memanfaatkan data Potensi Desa (Podes) Tahun 2003 dan 2005.

1.4. Metodologi

Pencacahan Podes dilakukan terhadap seluruh desa/kelurahan di Indonesia, didalamnya termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Permukiman Masyarakat Tertinggal (PMT) yang masih dibina oleh departemen terkait. Pencacahan dilakukan melalui wawancara langsung terhadap Kepala Desa/ Lurah, staf yang ditunjuk atau narasumber lain yang relevan.

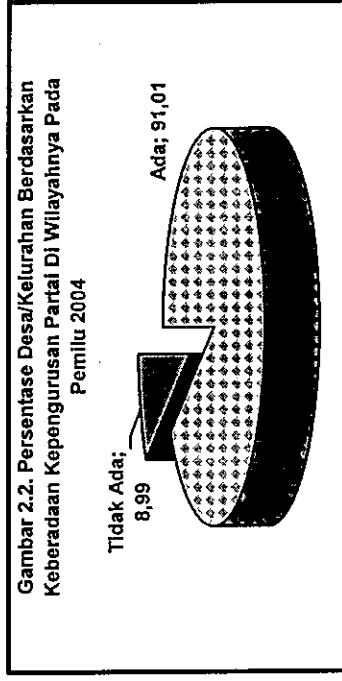
PETA POLITIK JAWA TIMUR

Peta politik di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan semenjak reformasi dengan diamandemennya UUD 1945, yang salah satu pasal yang diubah adalah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden dari cara perwakilan menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi semakin memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih partai politik yang diyakininya. Hal inilah yang mengakibatkan pergeseran kekuatan politik di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur khususnya.

2.1. Partai Pemenang Pemilu

Hal yang membedakan antara Pemilu sebelum dengan setelah era reformasi terletak pada proses pemilihan presiden. Pada era sebelum reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sekarang, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu tahap kedua, dimana pemilu tahap pertama untuk memilih anggota DPR.

Pada pelaksanaan Pemilu di Jawa Timur, perolehan suara pada Pemilu tahap pertama menunjukkan bahwa partai-partai yang dibentuk pada era orde baru masih mendominasi hasil Pemilu 1999 dan 2004. Beberapa partai baru yang dibentuk setelah era reformasi juga ada yang menjadi partai besar, tetapi juga banyak partai baru yang tidak mampu bersaing dan hanya menjadi peserta penggembira dalam Pemilu.



Dari data Podes tahun 2005 diketahui bahwa sebagian besar partai yang mendominasi dalam Pemilu legislatif ternyata mempunyai perwakilan/kepengurusan hingga tingkat desa/kelurahan. Pada Pemilu 2004, sebanyak 7.715 desa atau sekitar 91,01 persen dari total desa di Jawa Timur mempunyai pengurus partai. Dengan demikian hanya sebagian kecil desa/kelurahan di Jawa Timur yang tidak mempunyai pengurus partai pemenang Pemilu. Hal ini tentunya mendukung anggapan yang menyatakan bahwa keberadaan pengurus partai berpengaruh positif terhadap perolehan suara dalam Pemilu.

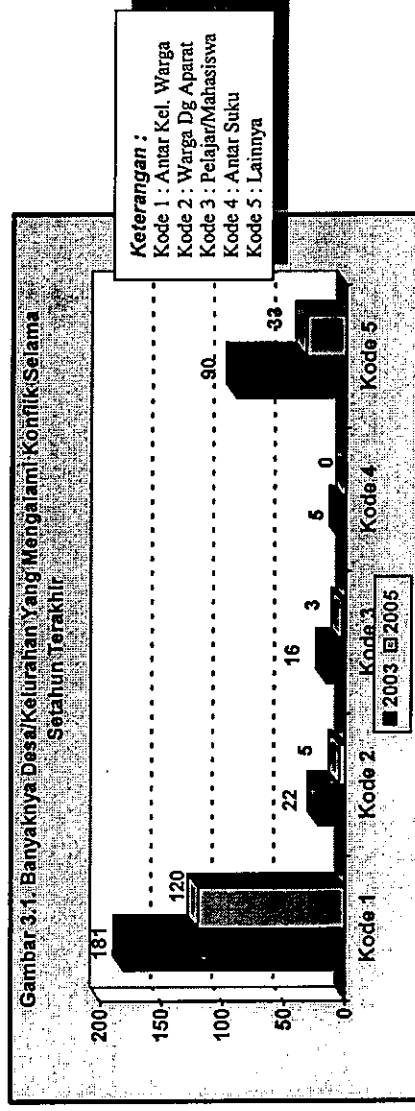
KONFLIK DALAM MASYARAKAT

Selain dampak positif, yang dapat dirasakan dengan terjadinya perubahan yang cepat dalam era reformasi adalah timbulnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat yang bermuara pada terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik tersebut tidak hanya muncul karena beban ekonomi, tetapi timbulnya ketegangan antar budaya dan struktur sosial dalam masyarakat, yakni kecemburuan dan kesenjangan sosial. Lunturnya kepercayaan masyarakat pada norma-norma moralitas mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku warga masyarakat yang rentan terjadinya konflik.

3.1. Variasi Konflik

Konflik yang terjadi dalam masyarakat Jawa Timur bervariasi bentuk dan ragamnya. Mulai dari perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga dengan aparat, perkelahian antar pelajar hingga perkelahian yang melibatkan suku-suku yang berbeda pernah terjadi di berbagai daerah di Jawa Timur.

Dalam kurun 2003-2005, banyaknya masyarakat desa/kelurahan yang pernah konflik turun dengan cukup signifikan. Berdasarkan data Podes tahun 2003 sebanyak 314 masyarakat desa/kelurahan mengalami konflik, dan pada tahun 2005 konflik hanya terjadi 161 desa/kelurahan. Penurunan jumlah desa/kelurahan yang pernah konflik mencerminkan kondisi keamanan semakin kondusif dan keberhasilan menekan jumlah kejadian konflik di Jawa Timur. Semua itu tidak lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut menjaga situasi dan kondisi keamanan di Jawa Timur.



Konflik yang paling sering terjadi di Jawa Timur adalah perkelahian antar kelompok warga (kode 1). Hal ini terjadi baik di tahun 2003 maupun tahun 2005, sedangkan untuk jenis konflik lainnya relatif jarang terjadi.

Tabel 3.1

Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang mengalami konflik

Kab/Kota	Banyak desa/kelurahan yang mengalami konflik	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
05. Kab. Blitar	20	8,06
77. Kota Madiun	2	7,41
21. Kab. Ngawi	11	5,07
72. Kota Blitar	1	5,00
06. Kab. Kediri	17	4,94

Jumlah dan jenis konflik yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur bervariasi. Persentase desa/kelurahan mengalami konflik yang paling besar terjadi di Kabupaten Blitar sebanyak 8,06 persen.

3.2. Efek Terjadinya Konflik

Konflik mengakibatkan berbagai kerugian masyarakat. Kerugian yang paling sering terjadi adalah kerugian material, namun tidak jarang pula berakibat pada jatuhnya korban jiwa, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Yang tidak kalah penting adalah trauma psikis yang terjadi pada masyarakat, dimana tentunya tidak dapat dinilai dengan materi dan sulit untuk menghapuskannya.

Tabel 3.2. Jumlah Korban Jiwa Meninggal, Luka-luka dan Kerugian Material dalam peristiwa konflik di Jawa Timur, Tahun 2003 - 2005

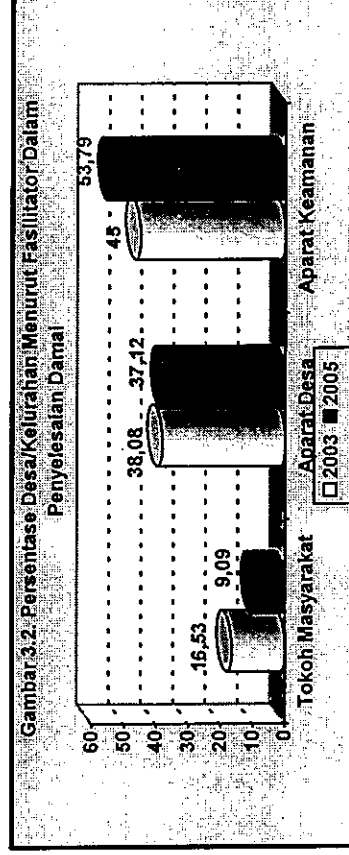
Jenis Kerugian	2003	2005
	(1)	(2)
1. Korban Meninggal Dunia (orang)	45	17
2. Korban Luka-luka (orang)	516	500
3. Kerugian Material (Ribuan Rupiah)	51.675.369	5.032.459

Di Jawa Timur, sebagai akibat dari peristiwa konflik yang terjadi menimbulkan kerugian material hingga mencapai Rp. 5.032.459.000,- pada tahun 2005. Namun kerugian tersebut masih lebih rendah dibanding kerugian akibat yang sama tahun 2003 yang mencapai Rp. 51.675.369.000,-. Kerugian tersebut belum termasuk korban manusia yang meninggal maupun yang luka-luka.

Besarnya kerugian dan korban di masyarakat yang ditimbulkan akibat terjadinya konflik menuntut seluruh elemen masyarakat mampu menjaga dan mengendalikannya diri guna menghindari terjadinya konflik horisontal di masyarakat.

3.3. Penyelesaian Konflik

Pada umumnya konflik yang terjadi di Jawa Timur dapat diselesaikan secara damai baik yang dimediasi oleh tokoh masyarakat, aparat desa dan aparat keamanan. Penyelesaian damai dari konflik yang terjadi sebagian besar dimediasi oleh aparat keamanan yang tentunya dengan tetap bekerjasama dengan aparat desa ataupun tokoh masyarakat setempat.

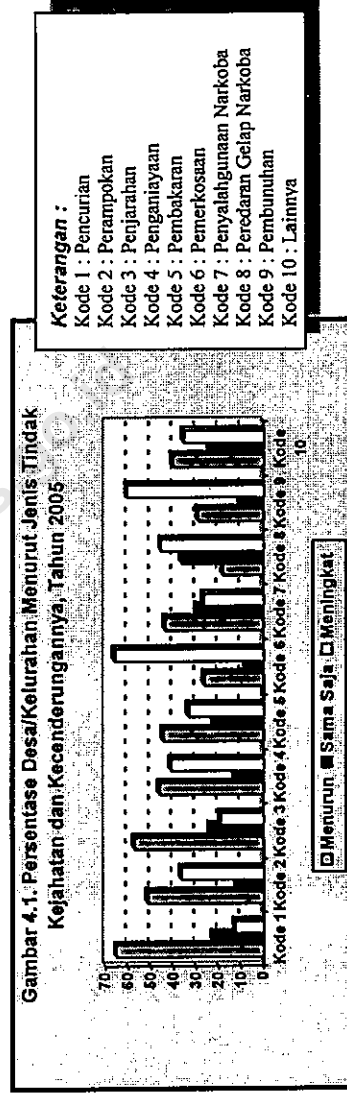


Tindak kejahatan pencurian merupakan jenis tindak kejahatan yang paling sering terjadi di Jawa Timur. Berdasarkan data hasil Podes tahun 2003 dan 2005 tercatat mayoritas desa/kelurahan masyarakatnya pernah menjadi korban tindak kejahatan pencurian, sedangkan untuk jenis tindak kejahatan yang lainnya relatif kecil.

Di Jawa Timur secara agregat jumlah desa/kelurahan yang masyarakatnya menjadi obyek kejahatan selama kurun waktu 2003-2005 mengalami penurunan, namun kontribusi tindak kejahatan pencurian masih yang terbesar. Untuk itu tetap diperlukan upaya-upaya tertentu untuk menekan tindak kejahatan pencurian. Seperti diketahui bahwa tindak kejahatan dapat terjadi tidak hanya dari keinginan dari pelaku kejahatan, namun juga karena adanya kesempatan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya seluruh masyarakat wajib turut serta dalam upaya mempersempit peluang akan terjadinya suatu tindak kejahatan.

4.2. Kecenderungan Tindak Kejahatan

Berdasarkan pengakuan/pandangan aparat desa diketahui kecenderungan terjadinya tindak kejahatan menurun dibandingkan keadaan tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini berguna untuk memprediksi jenis-jenis tindak kejahatan tertentu yang berpotensi untuk terulang kembali.



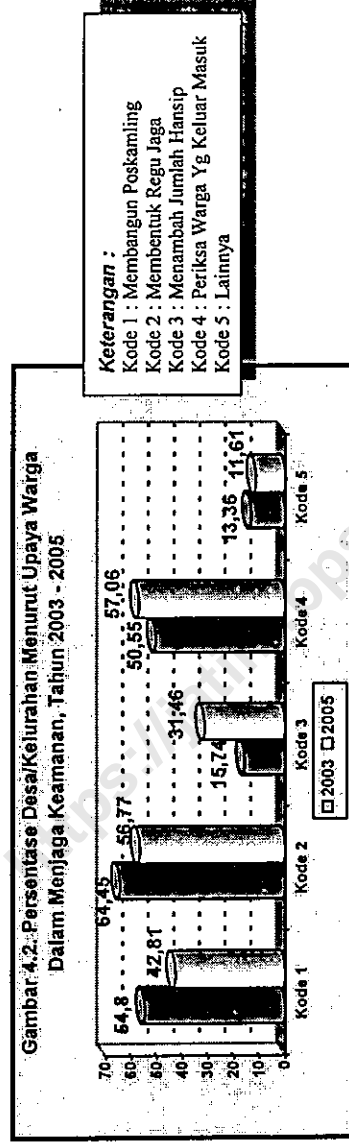
Dari trend perkembangan tindak kejahatan, secara umum diketahui ada kecenderungan penurunan jumlah tindak kejahatan dibandingkan kejadian tahun sebelumnya. Namun untuk beberapa jenis tindak kejahatan tertentu menunjukkan kecenderungan meningkat. Tindak kejahatan pemerksaan dan pembunuhan

merupakan jenis tindak kejahatan yang cenderung meningkat dibanding keadaan tahun sebelumnya..

Khusus untuk tindak kejahatan peredaran gelap narkoba perlu mendapat perhatian yang serius dari jajaran terkait, mengingat selain menunjukkan kecenderungan kenaikan, tindak kejahatan ini menimbulkan efek domino yang sangat besar.

4.3. Upaya Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan

Masyarakat Jawa Timur sebenarnya telah berupaya turut menjaga keamanan melalui penjagaan keamanan di lingkungannya. Pembangunan Poskamling dan peningkatan kegiatan menjaga keamanan dan lingkungan merupakan contoh dari sekian banyak jenis usaha menjaga keamanan dan lingkungan yang telah dilakukan.



Upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga masyarakat Jawa Timur pada tahun 2003 dalam mengantisipasi tindak kejahatan di lingkungannya berturut-turut adalah dengan membentuk regu jaga, membangun poskamling dan melakukan pemeriksaan terhadap warga yang keluar masuk wilayah desa/kelurahan. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2005, namun dengan urutan yang berbeda.

Dari informasi ini, dapat diketahui adanya gejala penurunan partisipasi masyarakat dalam usaha ikut menjaga keamanan lingkungan, khususnya untuk upaya-upaya yang secara langsung melibatkan masyarakat. Kecenderungan ini tercermin dari turunnya persentase desa/kelurahan di Jawa Timur yang membentuk regu jaga di wilayahnya.

Sementara itu ada kecenderungan baru dalam masyarakat Jawa Timur dalam menjaga keamanan yang fokus pada upaya penambahan jumlah aparat pengamanan lingkungan. Ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase desa/kelurahan di Jawa Timur yang melakukan penambahan jumlah anggota hansip/linmas yang dimiliki. Fenomena ini secara tidak langsung memberikan "warning" kepada pihak-pihak terkait guna lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperan serta secara aktif dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing.

4.4. Keberadaan Sarana dan Aparat Pengamanan

Salah satu faktor yang turut mempunyai andil dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat adalah keberadaan sarana/fasilitas keamanan, seperti pos hansip/kamling dan pos polisi.

Tabel 4.2. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Pengamanan Lingkungan, Tahun 2003 – 2005

Jenis Sarana	2003	2005
(1)	(2)	(3)
Pos Hansip/Kamling	8.269	8.189
Pos Polisi	806	851

Secara agregat dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah desa/kelurahan di Jawa Timur yang memiliki sarana pengamanan lingkungan sedikit mengalami penurunan. Penurunan terjadi akibat berkurangnya jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana pos hansip/kamling di wilayahnya, namun cukup mengembirakan adalah semakin meningkatnya jumlah desa/kelurahan di Jawa Timur yang memiliki pos polisi di wilayahnya. Dengan keberadaan fasilitas ini diharapkan aparat kepolisian dapat lebih mudah melakukan fungsi pengawasan di lingkungan masyarakat sekitar.

Sarana yang ada akan lebih ideal jika ditunjang dengan keberadaan aparat keamanan lingkungan dalam jumlah yang memadai. Di Jawa Timur pada tahun 2003 dan tahun 2005, rata-rata setiap desa/kelurahan mempunyai anggota hansip/linmas sebanyak 38 orang. Dengan aparat keamanan lingkungan sejumlah tersebut diharapkan keamanan dan ketertiban masing-masing lingkungan dapat terjaga dan terkendali.

Tabel 4.3. Urutan 5 teratas kab/kota berdasarkan Rata-rata Jumlah Anggota Hansip/Linmas

Kab/Kota	Rata-rata Anggota Hansip/Linmas	
	(1)	(2)
73. Malang	3.896	68,35
79. Batu	1.513	65,78
72. Blitar	1.213	60,65
76. Mojokerto	978	54,33
71. Kediri	2.343	50,93

Keberadaan anggota hansip/linmas di Jawa Timur mengalami persebaran yang kurang merata. Pada sejumlah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur mempunyai jumlah anggota hansip/linmas yang cukup besar di wilayahnya. Di setiap desa/kelurahan dapat dilengkapi dengan aparat pengamanan lingkungan di atas 50 orang. Tabel 4.3. diatas menunjukkan beberapa daerah di Jawa Timur yang dapat dikategorikan "surplus" tenaga pengamanan lingkungan.

Namun disisi lain, beberapa daerah lainnya di Jawa Timur masih terjadi kekurangan tenaga pengamanan lingkungan. Bahkan apabila kita bandingkan dengan daerah yang "surplus", jumlahnya baru mencapai setengahnya atau bahkan ada yang hanya sepertimanya saja. Daerah-daerah yang "minus" tenaga pengamanan lingkungan sebagian besar adalah kabupaten/kota di Pulau Madura. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4. Urutan 5 terbawah kab/kota berdasarkan Rata-rata Jumlah Anggota Hansip/Linmas

(1) Kab/Kota	(2) Jumlah Anggota Hansip/Linmas	(3) Rata-rata Anggota Hansip/Linmas
28. Pamekasan	5.429	28,88
22. Bojonegoro	12.388	28,81
13. Probolinggo	8.948	27,12
27. Sampang	4.074	22,14
26. Bangkalan	2.916	10,41

Dengan ditunjang berbagai sarana yang ada dan dilengkapi pula dengan jumlah aparat pengamanan lingkungan yang memadai, diharapkan keamanan dan ketertiban lingkungan di berbagai penjuru wilayah di Jawa Timur dapat tetap terjaga.

<https://jatim.bps.go.id>

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa situasi dan kondisi politik dan keamanan di Jawa Timur relatif cukup baik. Namun demikian beberapa hal masih perlu perbaikan guna mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang sudah baik tersebut. Berbagai usaha yang dilakukan hendaknya dapat melibatkan semua pihak, baik pemerintah melalui instansi terkait maupun masyarakat.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian khususnya pemerintah Propinsi Jawa Timur antara lain :

1. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpolitik, khususnya dalam partisipasinya dalam penyelenggaraan pemilu.
2. Tingginya tingkat kejadian perkelahian antar warga di Jawa Timur perlu mendapat perhatian lebih, mengingat karakteristik masyarakat Jawa Timur yang bertemperamen keras. Selain itu masyarakat Jawa Timur terdiri dari beraneka ragam etnis dan budaya, sehingga sangat rentan untuk terjadinya konflik dalam masyarakat.
3. Cukup besarnya jumlah desa/kelurahan di Jawa Timur yang warganya menjadi obyek tindak kejahatan pencurian. Untuk itu perlu adanya kewaspadaan khusus, serta pengawasan dan pengamanan yang lebih optimal, sehingga kasus kejahatan khususnya tindak kejahatan pencurian dapat ditekan.
4. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat berperan serta secara langsung dan aktif dalam upaya pengamanan lingkungannya.

5. Diperlukan penanganan yang lebih efektif dan komprehensif bagi daerah-daerah yang sering mengalami konflik dan daerah-daerah yang tinggi tingkat tindak kejahatannya. Selain itu perlu lebih diwaspadai daerah-daerah “rawan”, baik rawan terjadi tindak kejahatan maupun rawan terjadinya konflik dalam masyarakatnya.
6. Perlunya penanganan secara khusus guna mewaspadai perkembangan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Jawa Timur.

<https://jatim.bps.go.id>

